

Model *Pentahelix Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI

Gatot¹, Hamka², R. Luki Karunia³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

gatotlhn3@gmail.com¹, hamkalaicca@yahoo.com², karunialuki@gamil.com³

Abstract

The development and implementation of the Strengthening of National Values (Taplai Kbs) carried out by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI) has a strategic role in forming awareness in building a strong personality as a nation and has sensitivity to the state pattern that is dreamed of and agreed upon together, however based on facts on the ground, with the spread of hoaxes and hate speech still rampant, the negative impact of social media and the internet, there are conflicts of group/political interests which indicate that the weak understanding and implementation of national values in the nation's components has faded, also coupled with weak budget support to implement Development and Implementation of Taplai Kbs. The aim of the research is to explain how Lemhannas RI evaluates in identifying and analyzing inhibiting and supporting factors, as well as the Financing Strategy for Development and Implementation Programs for Strengthening National Values. The research method used is a qualitative research method with research instruments including interviews with 9 key informants, field observations by conducting direct observations at Lemhannas RI and document review as supporting data for data refinement. The research results illustrate that the Development and Implementation Program implemented by Lemhannas RI using APBN funds is not optimal as evidenced by the low budget provided in the program, so it requires strategy and collaboration in increasing the budget for Strengthening National Values.

Keywords: *Financing, Collaboration, Strengthening National Values*

Abstrak

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memiliki peranan strategis dalam membentuk kesadaran dalam membangun pribadi yang kokoh sebagai bangsa dan mempunyai kepekaan terhadap pola kenegaraan yang diimpikan dan disepakati bersama, namun berdasarkan fakta dilapangan dengan masih maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian, dampak negatif media sosial dan internet, terjadi konflik kepentingan golongan/politik yang menandakan bahwa lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa telah memudar, juga ditambah dengan lemahnya dukungan anggaran untuk melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana evaluasi Lemhannas RI dalam mengidentifikasi dan menganalisis factor penghambat dan pendukung, serta Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian diantaranya wawancara dengan 9 key informant, Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di Lemhannas RI dan telaah dokumen sebagai data dukung dalam penyempurnaan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Program Pembinaan dan Pelaksanaan yang dilaksanakan Lemhannas RI yang menggunakan dana APBN belum optimal terbukti dari masih rendahnya anggaran yang disediakan dalam program tersebut, sehingga membutuhkan strategi dan kolaborasi dalam meningkatkan anggaran Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Kolaborasi, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman terbanyak di dunia, selain berada pada posisi ke-4 negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 272.682.500 Jiwa yang berada diantara 17.404 pulau dan terdiri dari 1.340 Suku/etnik. (www.kemendagri.go.id Ditjen Dukcapil, (2022) Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2022). Pada dasarnya keragaman yang pada bagian kekayaan yang dapat menjadi keunggulan dalam pembangunan nasional. Pada bagian lainnya hal tersebut mengakibatkan terjadinya instabilitas apabila tidak diurus dengan baik dapat berdampak buruk yang akan menimbulkan terhambatnya pembangunan nasional. Salah satu pilar pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta adaptif serta menguasai pengetahuan dan teknologi, Idealnya Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar dalam mendukung berjalannya pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sendiri harus didukung oleh terbangunnya ekosistem yang kondusif dan mantapnya nilai-nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa.

Sehingga penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bertujuan membangun karakteristik bangsa, membangun rasa, semangat dan jiwa kebangsaan (nasionalisme), membangun kesadaran terhadap system nasional dalam mengelola keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI yang penuh akan nilai luhur terasa terpinggirkan sejak keran demokrasi terbuka lebar dalam system ketatanegaraan Indonesia. (www.lemhannas.go.id Lemhannas selenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) secara virtual).

Nilai spiritual leluhur yang tinggi yang diinterpretasikan sebagai nilai kebangsaan yang berasal dari 4 konsensus dasar sebagai nilai yang disepakati oleh *founding father* bangsa Indonesia saat ini menjadi unsur penting yang harus dimengerti, dan diamalkan dalam kehidupan di masyarakat, dimana dalam beberapa waktu kebelakang tengah mengarah pada kehidupan yang mementingkan kepentingan pribadi (Individulistik) yang berorientasi pada materi (materialistic) sehingga mengakibatkan aspek-aspek kebangsaan semakin jauh dari jati diri bangsa, dimana berdasarkan fakta di lapangan indeks ketahanan nasional tahun 2021 menunjukkan angka penurunan pada gatra-gatra tertentu yang berhubungan dengan ditinggalkannya nilai-nilai agung yang berasal dari 4 kesepakatan dasar kehidupan nasional Indonesia perkembangan Astagatra di Indonesia telah mengalami beberapa kemunduran dan dalam kondisi yang memprihatinkan. (Indeks Ketahanan Nasional 2021, Lembaga Ketahanan Nasional)

Beberapa permasalahan dari perkembangan aspek kehidupan yang muncul di Indonesia dalam beberapa prespektif disebabkan cepatnya perubahan sosial akibat kemunculan era *post truth* yang muncul akibat arus informasi yang semakin terbuka dengan adanya teknologi internet. Namun fasilitas yang telah di akomodasikan oleh internet ternyata tidak menjamin terbukanya pemikiran seseorang. Faktanya justru kondisi dalam beberapa waktu terakhir akibat perkembangan internet berdampak pada banyaknya muncul narasi prasangka-prasangka yang kerap kali muncul akibat pemberitaan palsu (Hoax). (www.kompas.com Laksono Hari Wiwoho 2019)

Hoax yang kemudian berkembang dan mengarah kepada ujaran-ujaran kebencian yang muncul dengan memanfaatkan media internet merupakan ancaman laten yang muncul sepanjang tahun. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019, 87,50 % responden mengaku menerima hoax melalui medsos dan 67% melalui aplikasi Chatting. Tema hoax yang paling banyak diperoleh responden adalah tema sosial-politik (93,20%), dan pemerintah (61,70%). Isu-isu yang berkembang seperti politik identitas akan diperparah dengan system “*algoritma*” pada platform media sosial yang memiliki system *filter bubble* berdampak pada hoax dan ujaran kebencian menyebabkan pengguna media sosial maupun media online terperangkap dalam ruang gema (*Echochamber*) yang semakin mempengaruhi emosi pengguna media sosial dalam menyikapi sebuah informasi yang muncul.

Narasi nilai-nilai kebangsaan yang tereduksi oleh dampak negatif media sosial dan internet juga diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata dan menyebabkan masyarakat yang belum memiliki standart untuk memilah dan mengevaluasi secara kritis informasi yang membanjiri media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube hingga aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Line dan Telegram.

Beberapa hal tersebut dapat di interpretasikan bahwa terdapat mispersepsi dan adanya paham yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi pada tataran elit yang merupakan dampak dari adanya perbedaan visi dalam Tata Kelola sistem kenegaraan, hal tersebut kemudian berakibat pada mudahnya merambah dalam kehidupan masyarakat “*grass root*” (Masyarakat tingkat bawah) dan ternyata konsekuensi tersebut berdampak negatif pada hubungan sosial masyarakat yang kemudian menciptakan segmentasi pada masyarakat yang terbagi menjadi kelompok tertentu maupun sentiment berlatar belakang kedaerahan, religiusitas hingga ideologis, berdampak pada kondisi persatuan menjadi berkurang dan kesatuan bangsa menjadi semakin merenggang.

Di lain sisi, terjadi konflik kepentingan golongan/politik yang jadi hambatan besar bagi kemajuan bangsa, karena proses pembangunan nasional terabaikan sebagai upaya peningkatan taraf hidup bangsa guna mencapai mimpi masyarakat yang adil dan Makmur, berlandaskan beberapa fakta tersebut dapat di tafsirkan bahwa terdapat degradasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat, sehingga untuk mereduksi dan mencegah semakin meluasnya hal tersebut maka diperlukan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) pada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan nasional.

Dihadapkan dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan di awal, beberapa data dan fakta yang berkaitan dengan masih lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa dalam upaya mendukung pembangunan nasional dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa. Indikator lemahnya pemahaman nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) yang menyampaikan bahwa maraknya penyebaran Hoax dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan salah satu indicator bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lemah. (www.kesbangpol.kemendagri.go.id Kesbangpol (2021) Hoax dan ujaran kebenci dan factor utama dalam disintegrasi bangsa).

2. Lemahnya implemntasi nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dapat dikategorikan menjadi beberapa indicator, sebagaimana deskripsi berikut:
- a. Fenomena yang tidak sesuai demokrasi. Kualitas demokrasi Indonesia dalam separuh decade terakhir cenderung menurun berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia BPS (Badan Pusat Statisti). Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik menyebutkan beberapa fenomena yang tidak sesuai demokrasi terjadi selama satu decade terakhir terkait dengan deskripsi sebagai berikut :
 - 1) Politik Identitas. Politik identitas menjadi salah satu pemicu dari munculnya polaritas yang didasarkan oleh salah satu identitas tertentu baik itu identitas agama, suku maupun golongan tertentu yang menimbulkan *In group-out grup*, dengan kemunculan politik identitas menyebabkan teredukasinya nilai-nilai demokratis yang menjadi asas dan dasar sebuah pemilu.
 - 2) *Money Politik* (Politik Uang). Poltik uang menjadi salah satu fenomena yang menjadi primadona dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia, fenomena ini selalu menggunakan kekurangan kesejahteraan masyarakat, sehingga cukup mudah untuk di peralat, perilaku ini semakin tinggi pada setiap kontestasi politik.
 - b. Fenomena yang tidak sesuai persatuan bangsa. Indikator ini dari fenomena ini adalah adanya konflik yang didasarkan pada unsur SARA, dimana konflik disebabkan karena mudahnya massa terprovokasi.
 - c. Fenomena yang tidak sesuai Toleransi. Salah satu penyebab timbulnya konflik maupun pudarnya nilai-nilai kebangsaan salah satunya adalah Intoleransi.

Tabel 1. Data Tindakan Intoleransi & Radikalisme pada Lembaga Negara

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Aduan
1.	2019	1. Intoleransi	1. Intoleransi 35 aduan
		2. Anti-Pancasila	2. Anti-Pancasila 5 aduan
		3. Anti-NKRI	3. Anti-NKRI 27 laporan
		4. Radikalisme	4. Radikalisme 16 aduan
2.	2020	1. Intoleransi	1. Intoleransi 25 aduan
		2. Anti-Pancasila	2. Anti-Pancasila 5 aduan
		3. Anti-NKRI	3. Anti-NKRI 24 laporan
		4. Radikalisme	4. Radikalisme 10 aduan
3.	2021	1. Intoleransi	1. Intoleransi 15 aduan
		2. Anti-Pancasila	2. Anti-Pancasila 0 aduan
		3. Anti-NKRI	3. Anti-NKRI 5 laporan
		4. Radikalisme	4. Radikalisme 15 aduan

Sumber: Kominfo & aduasn.id (2021)

3. Lemahnya dukungan anggaran untuk melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. Pada Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) tentunya dibutuhkan alokasi anggaran khusus atau cukup besar karena jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah jangkauan penyebarannya.

Mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat perlu kiranya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kepada komponen bangsa agar bangsa Indonesia dapat mengatasi segala macam ancaman. Guna mendukung pembangunan nasional, dimana manfaat yang diharapkan melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) dapat terbentuk dari masyarakat yang berakhlak, berkarakter, serta beretika bangsa yang pasti dan stabil, berubah menjadi falsafah hidup bangsa dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai harapan berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran itu, maka Pedoman Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) ini dirancang sebagai suatu Pedoman yang terbuka dan responsive terhadap perubahan, serta menghargai proses bagi lahirnya agen-agen perubahan yang berintegritas dan berkarakter Indonesia. (Pergub Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Taplai 2021).

Tabel 2. Esensi Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan

No.	Sumber	Esensi nilai-nilai	Kristalisasi nilai-nilai
1.	Pancasila	1. Nilai Religius	1. Ketuhanan
		2. Nilai kekeluargaan	2. Kemanusiaan
		3. Nilai Kelarasan	3. Persatuan
		4. Nilai Kerakyatan	4. Demokrasi
		5. Nilai Keadilan	5. Keadilan
2.	UUD 1945	1. Demokrasu	6. Plurais & Multikulturalis
		2. Kesamaan Drajat	7. Patriotis
		3. Ketaatan Hukum	
3.	NKRI	1. Kesatuan Wilayah	
		2. Persatuan Bangsa	
		3. Kemandirian	
4.	Sesanti Bhinneka Tunggal Ika	1. Toleransi	
		2. Keadilan	
		3. Gotong Royong	

Sumber: Hasil Kajian Kedeputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2021

Menurut Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 “Lemhannas RI sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Taplai Kbs guna meninggikan dan memperkuat wawasan kebangsaan guna menciptakan sifat sebuah bangsa. Melalui Kedeputian Bidang Kebangsaan Lemhannas RI yang memiliki tanggung jawab melaksanakan program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) juga menjalankan tugas di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat dan Bangsa Indonesia”.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini punya dua tema yang bisa digarisbawahi, pertama mengenai kolaborasi antar stakeholder dalam Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Kedua, mengenai Strategi Pembiayaan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang dilakukan Lemhannas RI. Dua tema ini memang harus merujuk pada penelitian-penelitian terlebih dahulu sehingga tidak ada pengulangan pembahasan masalah yang sama.

Penelitian Pertama oleh La Ode S.I. (2022) tentang Proses Tata Kelola Bersama dalam Pengelolaan Dana Desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif pengelolaan dana desa, dengan fokus pada dialog personal, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil. Dalam penelitiannya La Ode S.I. menemukan adanya komunikasi/dialog baik formal maupun informal untuk membangun rasa saling percaya dan menguntungkan bagi masyarakat, karena didasarkan pada upaya berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. La Ode S.I. menyimpulkan dalam penelitiannya adalah pemerintah desa Lipuralongo di kecamatan Labobo bekerja sama dengan pihak kepolisian, kelurahan dan pihak swasta untuk mengelola dana desa. Keterbatasan keterampilan dan sumber daya menjadi dasar kerjasama. Komunikasi dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan yang muncul di kalangan warga desa terkait pengelolaan keuangan desa, pertama di tingkat desa akan dipecah. Dialog pribadi, saling pengertian dan membangun kepercayaan tidak hanya terlihat dalam pembicaraan formal (Mudus dan Mudez) tetapi juga dalam acara-acara tertentu. Para Pengelola Dana Desa memerlukan suatu bentuk pembinaan dan pelatihan bagi perangkat desa dan seluruh lapisan masyarakat agar tercipta kesepakatan dan kesepahaman bersama diantara para pelaku yang bekerja sama.

Kedua beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berasal dari Ipik Permana, Nanan Suleman dan Mo Tawfiq Hidayat (2022), dalam penelitiannya terkait Tata Kelola Bersama Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. Penelitian ini menjelaskan bagaimana koperasi di SAMSAT Kota Cirebon mengelola dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Ranmor kota tersebut. Ipik Permana Dkk melihat factor penyebab tata kelola koperasi yang belum terbukti efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cirebon. Ipik dkk menganalisis strategi apa saja yang ditempuh untuk memperkuat tata kelola koperasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cirebon. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *collaborative governance* dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB di SAMSAT Kota Cirebon yaitu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama; melakukan rapat-rapat koordinasi; melakukan sosialisasi, meningkatkan network data agar benar-benar terintegrasi, pemberian insentif bagi masyarakat (wajib pajak) berupa program Triple Untung dan Triple Untung Plus; serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Ketiga Penelitian oleh R. Hari Bustomi dan Ferdiansyah Wicaksono, dalam penelitiannya tentang “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung*”. Dalam penelitiannya R. Hari Bustomi dkk menemukan bahwa yang dicapai dalam penelitian ini adalah Collaborative Governance dengan menggunakan pendekatan dimensional pada proses pengembangan masyarakat berbasis industri kreatif di Kota Bandung yang ditentukan oleh konteks sistem, dinamika kolaboratif dan perilaku kolaboratif. Hal ini mengarah pada kesepakatan

antar institusi yang berperan dalam implementasi kebijakan sebagai proses berkelanjutan membangun kepercayaan sehingga tindakan bersama memenuhi kepentingan dan tujuan semua pihak dan tersedia untuk semua pihak.

Keempat penelitian oleh Ike Kusdyah Rachmawati, Eko Aristanto, Stella Alvianna, Syarif Hidayatullah, dan Irary Windhyastiti, (2022). Dalam penelitiannya dengan judul Tata Kelola Strategi Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan Penta Helix Kota Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memfokuskan pada strategi pengembangan industri kreatif sebagai alat untuk merevitalisasi perekonomian Kota Batu. Beberapa strategi skor teratas dipilih untuk penelitian ini. yaitu strategi kelemahan-peluang (WO). Hal ini diartikan sebagai strategi untuk melestarikan kelemahan bisnis ekonomi kreatif Kota Batu dan memanfaatkan peluang yang ada. Kesimpulannya, 1) beri tahu masyarakat bahwa wirausahawan kreatif mendukung dan mendukung para pemimpin bisnis dan perusahaan, 2) mengembangkan kemungkinan pariwisata lainnya dengan memperluas desa tema dan desa wisata 3) Mendirikan lembaga pendidikan dan sertifikasi pariwisata. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk sampling wisata perlu dikembangkan lebih lanjut, dan diperlukan jenis dan model industri kreatif yang lebih spesifik.

Merujuk pada penelitian-penelitian yang telah saya terangkan di atas, apa yang membedakan penelitian saya adalah fokus kolaborasi dengan para stakeholder dalam pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang dirangkum sebagai model Strategi Pembiayaan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang dilakukan Lemhannas RI dimana model sebelumnya berupa keikutsertaan para stakeholder dalam hal peserta kegiatan Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Program ini secara formal masih bisa dibilang cukup baru sehingga penelitian lainnya punya titik pembeda dengan penelitian ini. Melihat posisi Lemhannas RI sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas Mendidik dan Mengkaji dengan Tenaga Ahli Pendidik dan Tenaga Ahli Pengkaji yang profesional dan teruji, membuat kolaborasi dengan para stakeholder menjadi hal yang sangat penting di sana Model kolaborasi oleh Ansell dan Gash dikembangkan dalam bentuk kolaborasi multi level pengambil kebijakan, baik di tingkat Pimpinan Tertinggi maupun Pimpinan Tingkat mmenengah dan bawah baik dari Pemerintah (Lemhannas) Para Pengusaha dan Media Massa, sesuai dengan peran dan fungsinya.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif, merupakan penelitian ilmiah yang mendalam dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dalam komunikasi antara peneliti dengan narasumber serta berbagai kejadian yang kemudian menjadi suatu informasi bagi peneliti (Moleong, 2005). Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan fakta yang ada di lapangan (Cresswell, 2016) Disamping itu juga penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mencatat seluruh fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca melalui wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain, dan peneliti harus membandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan (Bungin, 2008). Selanjutnya dapat dilakukan analisa data melalui pengorganisasian data, dengan cara memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dijadikan temuan dan kesimpulan. Wawancara dilakukan

dengan 9 key informant yang berasal dari Lemhannas RI, Para Pengusaha, dan Para Pejabat di Media Massa.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang disajikan oleh Peneliti Lemhannas RI berusaha melakukan kegiatan kolaborasi dengan Stakeholder terkait dengan tujuan peningkatan Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Peluang kerjasama dengan para Stakeholder terkait sangat tinggi. Hanya saja Lemhannas kurang optimal memanfaatkan peluang tersebut dengan menggunakan strategi kolaborasi Model Pentahelix.

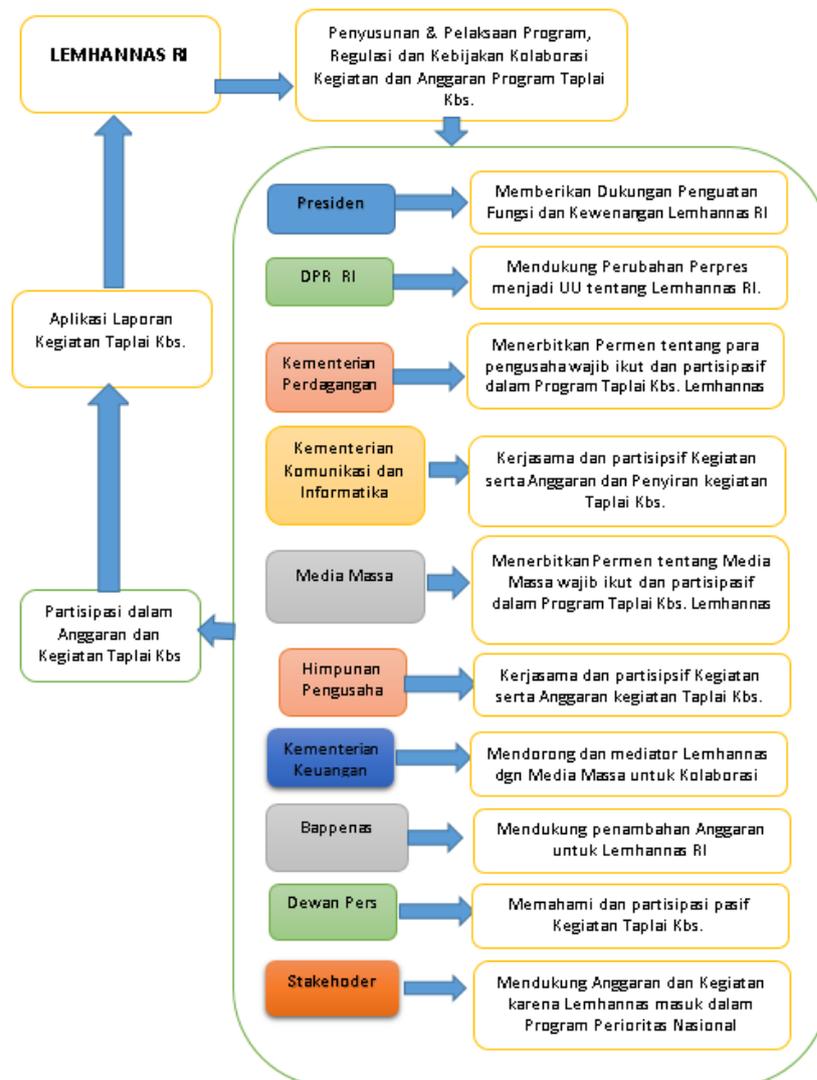
1. Model Kolaborasi

Penyusunan model kolaborasi yang efektif dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI, tersaji dalam Gambar dibawah ini memperhatikan beberapa tugas, fungsi, kewenangan dan peran di beberapa level kolaborasi dalam mencapai tujuan kolaborasi.

Tujuan kolaborasi dibagi menjadi dua yaitu: Pertama proses penyusun dan pelaksanaan program, regulasi dan kebijakan terkait Strategi Pembiayaan Taplai Kbs. untuk kemudian dilakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program.

Tujuan yang kedua adalah melakukan Kerjasama dengan stakeholder dalam hal kegiatan dan pembiayaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, kemudian melakukan edukasi melalui program FGD dan Diskusi serta Forum lainnya secara berkesinambungan, perlunya dukungan anggaran yang memadai, dan sosialisasi melalui media massa. Model kolaborasi yang dirumuskan yaitu:

1. Lemhannas RI melakukan penyusun dan pelaksana program, regulasi dan kebijakan didalam kolaborasinya terkait Strategi Pembiayaan Taplai Kbs. untuk kemudian dilakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program.
2. Kolaborasi dengan para stakeholder, berfungsi Lemhannas RI untuk melakukan Kerjasama dengan Pengusaha dan Media Massa serta Stakeholder lainnya dalam kegiatan dan pembiayaan Taplai Kbs. dengan tujuan percepatan dan perluasan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Model Kolaborasi Lemhannas RI dengan para Stakeholder

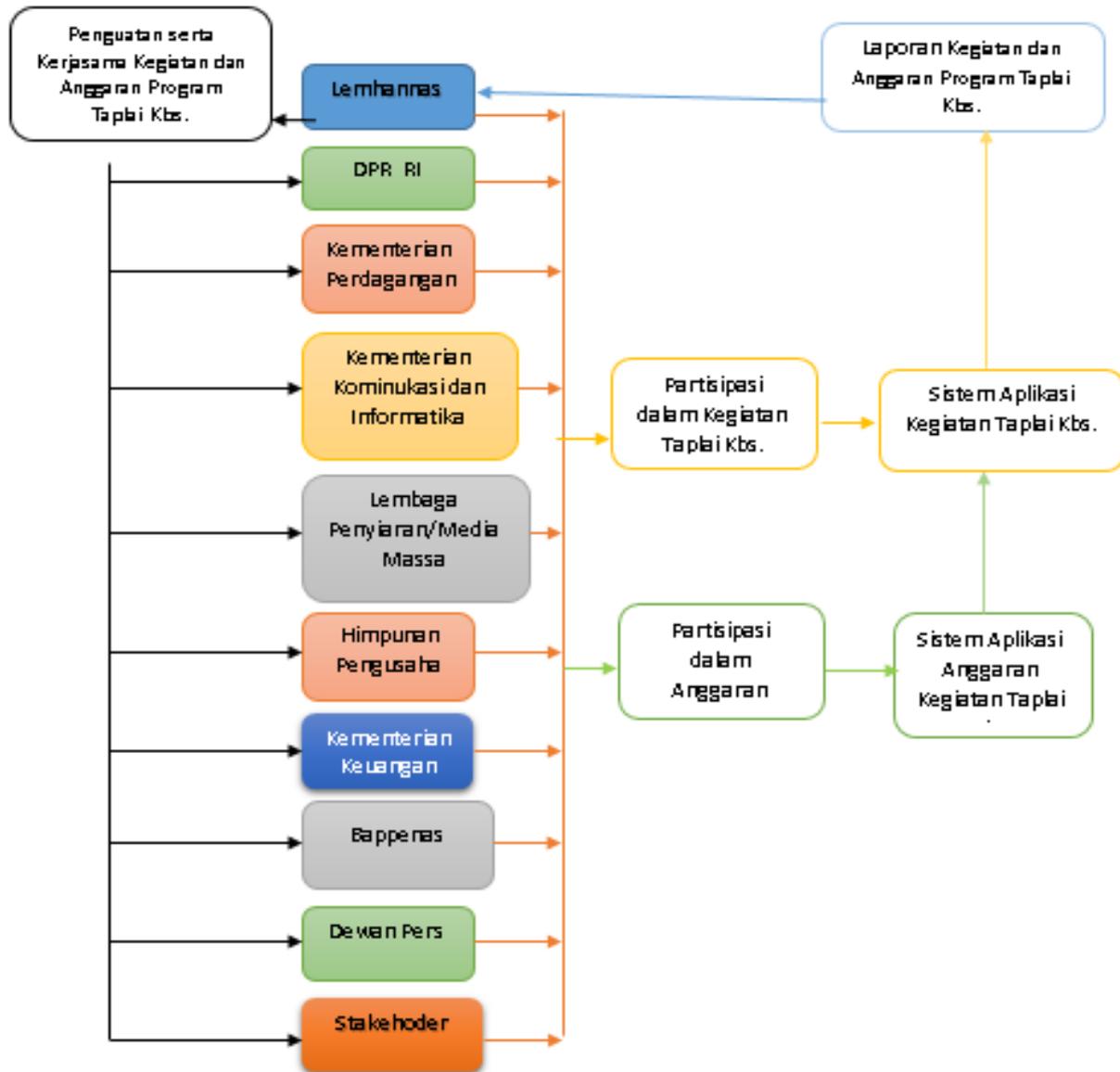
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

2. Strategi Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Peneliti melakukan evaluasi, identifikasi permasalahan dan kendala-kendala dilapangan yang didapatkan dari *Key Informant*, dan analisis data, sehingga dapat dianalisis strategi peningkatan besarnya anggaran Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI sebagai berikut:

- Membuat Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang berformat Milenial untuk kalangan pemuda agar mereka lebih tertarik ikut program tersebut. Makin banyak peminat maka anggaran dari APBN semakin besar.
- Koordinasi dan konsultasi dengan DPR RI tentang perubahan dasar pembentukan Lemhannas RI dari yang berdasarkan Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang tentang Lemhannas RI.
- Bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk membuat Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang Peningkatan SDM para Pengusaha untuk

- mengikuti Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI supaya mereka dalam bisnisnya mengutamakan kepentingan bangsa bukan kepentingan Perusahaan saja serta anggaran Pendidikan Lemhannas dimasukan dan diagendakah setiap tahunnya.
- d. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk membuat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Peningkatan SDM para awak media (Redaktur dll) untuk mengikuti Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI supaya mereka dalam peliputan dan penyiaran mengutamakan kepentingan bangsa dan pemberitaannya bersifat persatuan dan kesatuan bukan memecah belah dan penyebaran berita bohong, serta anggarannya disediakan dari mereka.
 - e. Kerjasama dengan Dewan Pers terkait dengan Pembinaan dan himbuan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (TV, Media Cetak, Online dan radio) untuk ikut gabung dan bekerjasama dengan Lemhannas tentang serta kesediaan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.
 - f. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran (Stasiun TV, Media Cetak, Online dan Radio) tentang kegiatan dan anggaran untuk Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
 - g. Kerjasama dengan Perhimpunan Pengusaha terkait dengan Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan anggaran CSR bisa Sebagian dihibahkan ke Lemhannas untuk pembiayaan Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
 - h. Membuat Forum Coffee Morning Lemhannas RI dengan Para Pemimpin Redaksi dan Pengusaha Menengah Keatas, membahas tentang Pentingnya Kerjasama penyelenggaraan dan pembiayaannya Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
 - i. Memberikan Sertifikat Kelulusan yang bisa diterima sebagai persyaratan untuk diterima sebagai Dosen dan narasumber tentang Nilai-nilai Kebangsaan.
 - j. Memberikan Kajian Strategis dan kekinian tentang Pentingnya Program Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk disampaikan kepada Bappenas dan Kemenku RI, agar mereka mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap tentang Tupoksi Lemhannas RI dan berdampak pada peningkatan anggaran.



Gambar 2. Strategi Peningkatan besarnya anggaran Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjelaskan tentang Model *Pentahelix Collaborative Governance* dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI. Maka kesimpulan dalam penelitian ini, meliputi permasalahan yang dihadapi dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI mulai dari permasalahan kecilnya anggaran serta kolaborasi yang dioptimalkan dengan para Pengusaha dan Media Massa.

Terdapat beberapa faktor penghambat kolaborasi yakni: tugas, fungsi dan kewenangan yang masih tersekat-sekat dalam urusan sektoral masing-masing *Stakeholder*, serta belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi Lemhannas RI khususnya Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dari para *Stakeholder*. Tetapi terdapat juga peluang kolaborasi yang telah ada dari berbagai unsur dalam kegiatan dan anggaran Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan ini, seperti dukungan kebijakan dari Pemerintah (K/L), kerjasama dengan para Pengusaha dan Media Massa. Adapun model kolaborasi yang ditawarkan adalah Model Kolaborasi antara Lemhannas RI dengan para Pengusaha dan para Media Massa Nasional. Serta Strategi yang dilakukan peneliti meliputi evaluasi, identifikasi permasalahan dan kendala-kendala serta analisis data untuk peningkatan besarnya anggaran Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI seperti membuat Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang berformat Milenial dan kekinian, koordinasi dan konsultasi dengan DPR RI guna pembuatan UU tentang Lemhannas RI, Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dewan Pers, Lembaga Penyiaran (Stasiun TV, Media Cetak, Online dan Radio), Perhimpunan Pengusaha, *Forum Coffee Morning* Lemhannas RI dengan Para Pemimpin Redaksi dan Pengusaha, Sertifikat Kelulusan persyaratan untuk diterima sebagai Dosen dan narasumber serta hasil kajian strategis tentang pentingnya Tapalikbs.

SARAN

Menindaklanjuti kesimpulan hasil penelitian *Collaborative Governance* Model *Pentahelix* dalam Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, beberapa saran atau rekomendasi guna perbaikan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan ke depan, untuk menjawab permasalahan riil Lemhannas RI dan sinergitas antar *stakeholder* yang selama ini yang belum optimal. Berikut dipaparkan beberapa rekomendasi tersebut:

- a. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk Lemhannas RI sebagai solusi dalam menentukan arah dan kebijakannya pada Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan agar dapat lebih optimal.
- b. Lemhannas RI perlu melakukan Kolaborasi dengan banyak Pihak yang Strategis seperti Pemerintah (K/L), Perguruan Tinggi, Media Massa, Pengusaha, dan Masyarakat sebagai Sumber Daya melalui Perjanjian Kerja Sama atau MoU yang memuat peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab sehingga memiliki komitmen dalam melakukan dukungan kegiatan dan anggaran.
- c. Diperlukan Penelitian lanjutan guna merumuskan Model dan Strategi yang lebih tepat dan tajam terkait dengan Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI, mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI.
- d. Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk para penelitian lebih lanjut guna menambah informasi, cakrawala dan data tentang Model *Pentahelix Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan pada setiap program unggulan yang membutuhkan pembiayaan yang besar tapi anggaran yang tersedia tidak cukup.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

- Ansell Christ and Gash Alison. 2007. ", Colaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administrations Research*. Barkeley, 28 (2), 81 – 128.
- Meiga Ervianti. 2018. "Faktor – Faktor yang menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi dan Manajemen Rekayasa". *Jurnal Ilmiah Universitas Andalas*, 31 (8), 117 – 138.
- Sururi Ahmad. 2018. "Collaborative Governance Sebagai Inovasi kebijakan Strategis". *Jurnal Kebijakan Publik Gadjah Mada University*, 11 (3), 17 -31.
- Septiaji Eko Nugroho. 2021, "Kolaborasi, Riset, dan Volunterisme Membangun Resiliensi Dalam Gejolak Pandemi “. “*Jurnal Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*”.

Sumber: Hasil Kajian Kedeputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2021

Buku.

- Adies, Kadir. (2018). *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Jakarta : Penerbit Merdeka Book.
- Astawinetu, D. E. D., & Handini, D. S. (2020). *Manejemen Keuangan: Teori dan Praktek* (D. E. D. Astawinetu & D. S. Handini (eds.)). Scopindo Media Pustaka.
- Agus, S., & Irfani. (2020). *Manajemen Keuangan Dan Bisnis* (Bernadine (ed.)). PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darsono Dan Tjatjuk, Siswandoko, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*, Nusantara Consulting, Jakarta
- Haryatmoko. (2020). *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan Jawaban atas tantangan Disrupsi-Inovatif*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Islamy. La Ode Syaiful. 2018 *Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi*: Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*: Yogyakarta, Deepublish (Grup penerbitan CV. Budi Utama).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moelong J. Lexy, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Menurut Musthafa (2017: 3), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017
- Menurut M. Nafarin (2007:11), "Anggaran adalah rencana yang tercatat untuk operasi suatu organisasi,
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* : Yogyakarta, CAPS.

Yudi, Latif. (2014). *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Pembuatan*. Jakarta : Penerbit Mizan.

Yusuf, MA. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Peraturan/Perundangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Lemhannas RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemda Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Intruksi Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental